



Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



***Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 28 Tahun 2021
Tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2022***





SALINAN

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2022 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2022 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2022 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2022 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2022.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006



KATA PENGANTAR

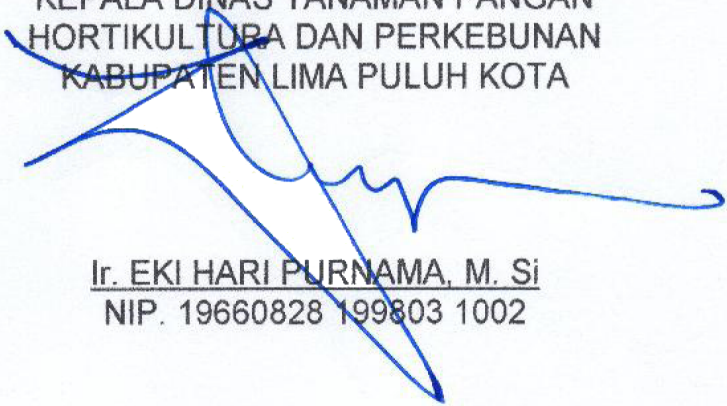
Puji syukur disampaikan kepada Allah SWT, karena atas Berkah dan KaruniaNya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dalam penyusunannya dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan pemangku kepentingan pembangunan pertanian, yang selanjutnya berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini kami buat sebagai salah satu dokumen perencanaan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota .

Sarilamak, Agustus 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Ir. EKI HARI PURNAMA, M. Si
NIP. 19660828 199803 1002



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| I.2. LANDASAN HUKUM | 2 |
| I.3. MAKSUD DAN TUJUAN..... | 4 |
| I.4. SISTEMATIKA | 5 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU | 7 |
| II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD... .. | 7 |
| II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD | 30 |
| II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD..... | 32 |
| II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP..... | 35 |
| II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT | 46 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 51 |
| III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL | 51 |
| III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH | 53 |
| III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN | 54 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 56 |
| BAB V PENUTUP | 57 |



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 1312)



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota.



2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2022.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. **Pendahuluan**, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Landasan hukum
 - 1.3 Maksud dan tujuan
 - 1.4 Sistematika penelitian
- II. **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Distanhortbun, analisis kinerja pelayan Distanhortbun, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Distanhortbun dan sebagainya.
 - 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah
 - 2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
 - 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
 - 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- III. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Distanhortbun dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022
 - 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
 - 3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

3.3 Program dan kegiatan

- IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Memuat Program dan Kegiatan Dinas dalam mewujudkan rencana kerja yang telah disusun.
- V. **PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 18.668.911.740,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.695.377.916,- dan belanja langsung sebesar Rp. 8.973.533.824,- dimana belanja langsung yang terdiri 10 Program dan 45 kegiatan.

Nilai capaian kinerja untuk 45 kegiatan tersebut berkisar dari yang terendah 74,99% sampai yang tertinggi 100% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 98,46%.

Melalui segi akuntabilitas keuangan dari Rp. 18.668.911.740,- anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar Rp. 17.374.826.811,- (93,51%).

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ini. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, beberapa kegiatan dengan realisasi fisik dibawah 90 % antara lain :

- a. **Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung/Kantor** dengan realisasi fisik 88.15%. Keluaran dari kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 155 unit dengan baik selama satu tahun dengan capaian kinerja terpenuhinya prasarana operasional kantor. Pemeliharaan memenuhi seluruh kendaraan dinas, namun penggantian suku



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

cadang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan masing-masing kendaraan tersebut.

- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Pemeliharaan Gedung/Kantor** dengan realisasi fisik 74,99%. Adapun keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini terlaksana pemeliharaan peralatan seperti komputer/laptop, printer dan pendingin ruangan untuk 1 tahun, dengan capaian kinerja meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor. Beberapa peralatan gedung kantor sudah melewati usia ekonomis, sehingga pemeliharaan dan penggantian suku cadangnya tidak efektif dilaksanakan.
- c. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan** dengan realisasi fisik 84,64%. Dikarenakan adanya bencana Covid 19 mengakibatkan adanya pemotongan dana DAK untuk rehab BPP dipotong seluruhnya maka akibatnya kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan juga tidak bisa dibayarkan. Selain itu karena adanya kesalahan kode rekening untuk pembelanjaan sarana BPP yaitu pembelian sarana komputer 2 unit, laptop 1 unit, dan printer 1 unit masuk ke kode rekening belanja bangunan gedung sehingga pembelian sarana BPP tersebut tidak bisa dibelanjakan dan dikembalikan ke kas daerah.
- d. Kegiatan Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Tani Nelayan Andalan** yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya pandemi Covid 19 sehingga kegiatan yang sedianya diadakan tahun 2020 diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2022.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2021 dengan Total Belanja Langsung APBD sebesar Rp. **8.973.533.824,-** terurai dalam 10 program dan 45 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan Pertanian;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pembangunan pertanian yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam pembangunan pertanian yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian;
- d. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

Tabel 2.1 Strategi dan Kebijakan 2022

| Tujuan/ | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|--|--|--|
| 1. Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB dalam harga berlaku | 1. Meningkatnya produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 3% pertahun | 1. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian | 1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota |
| | | 2. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian | 1. Pengembangan prasarana pertanian 2. Pembangunan prasarana pertanian |
| | | 3. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 1. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota |
| | | 4. Perizinan usaha pertanian | 1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota |
| | | 5. Penyuluhan pertanian | 1. Pelaksanaan penyuluhan pertanian |

Tabel TC.29
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | 100% | | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah | | | | | | 100% | | |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Rencana Kerja Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | | | 41,52 |
| | | Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | Dokumen Rencana Strategis Dinas | | - | - | - | - | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | RKA Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 0 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Perubahan RKA Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 0 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | DPA Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 0 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Perubahan DPA Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 0 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKJIP) | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 33,22 |
| | | Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKPJ) | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | | |
| | | Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | 12 Dokumen | | |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Data Base | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22,44 |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Tahun | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100% | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN | 156 Orang | - | - | - | - | 1 Tahun | 468 orang | 49,99 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 3 dokumen | 0 |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 dokumen | 99,35 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan Bulanan | 12 dokumen | - | - | - | - | 12 Dokumen | 3 dokumen | 25,72 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Prognosis | 2 dokumen | - | - | - | - | 2 Dokumen | 1 dokumen | 0 |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100% | | |
| | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan Barang Milik Daerah | 2 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0 |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Penatausahaan Barang Milik Daerah | 156 orang | - | - | - | - | 1 Tahun | 6 dokumen | 0 |
| | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | 100% | | |
| | Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen | 6 dokumen | 15,58 |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100% | | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 250 stell | - | - | - | - | | | |
| | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Laporan Penilaian Kinerja Pegawai | 157 orang | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 0 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Fasilitasi Aparatur Dinas Mengikuti Pelatihan SDM | 3 orang | - | - | - | - | 2 Kali | | 0 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Daerah | | | | | | 100% | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Fasilitasi Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 19 Gedung | - | - | - | - | 19 Gedung/Kantor | | 49,98 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sarana Perlengkapan Gedung / Kebutuhan Kantor (Alat Kebersihan) | 1 Tahun | - | - | - | - | 19 Gedung/Kantor | | 49,98 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Fasilitasi ATK Dinas, UPT dan BPP Kecamatan | 1 Tahun | - | - | - | - | 19 Gedung/Kantor | | 49,98 |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Fasilitasi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Untuk Dinas, UUPTD dan BPP Kecamatan | 1 Tahun | - | - | - | - | 19 Gedung/Kantor | | 49,98 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Konsumsi Tamu | 1092 Orang | - | - | - | - | 700 Porsi | | 49,98 |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Fasilitasi Konsumsi Rapat | 1 dokumen | - | - | - | - | 624 Porsi | | 49,98 |
| | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi | | - | - | - | - | 1 Tahun | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100% | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat | 163 Unit | - | - | - | - | 163 Unit | | 16,29 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan Bangunan Gedung/Kantor | 39 Unit | - | - | - | - | 39 Unit | | 2,71 |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Gedung/Kantor | 1 Tahun | - | - | - | - | 19 Gedung/Kantor | | 10,48 |
| | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | % Penyediaan Sarana Pertanian | | | | | | 3% | | |
| | Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 3% | | |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | 10 Unit | | 17,2 |
| | | Operasional Traktor Besar | | - | - | - | - | 10 Ha | | |
| | | Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian | 30 Orang | - | - | - | - | 30 Orang | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Pengadaan Becak Motor | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Pengadaan Mesin Tanam Jagung | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Pengadaan Alat Pengolahan Gambir | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Pengadaan Mesin Potong Rumput | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | | | | | | 3% | | |
| | Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman | Benih Sumber Varietas Banang Pulau Klas Benis NS, BS, BD & BP | - | - | - | - | - | 960 Kg | | 12,14 |
| | | Benih Sumber Varietas Junjuang Klas Benis NS, BS, BD & BP | 1200 kg | - | - | - | - | 960 Kg | | |
| | | Benih Sumber Var Junjuuang Klas Benis NS, BS, BD & BP | 1200 Kg | - | - | - | - | 960 Kg | | |
| | | Benih Tanaman Jeruk | | - | - | - | - | 500 Batang | | |
| | | Pelepasan Varietas Lokal Ubi Kayu | 1 Varietas | - | - | - | - | 1 Varietas | | |
| | | Benih Gambir Varietas Lokal dari Kebun Induk | 3.75 gram | - | - | - | - | | | |
| | | Benih Sumber Varietas Junjuang dalam Klas Benih BR | 10000 kg | - | - | - | - | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Pemurnian Varietas Lokal Padi Sawah | 1 Varietas | - | - | - | - | | | |
| | | Saprodi untuk Pengembangan Jagung Hibrida | 10 Ha | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | | Pemeliharaan Kebun Induk Gambir (Pohon Induk Terpilih) | - | - | - | - | 75 Batang | | | |
| | | Pemurnian Varietas Lokal Padi Sawah | - | - | - | - | 1 Varietas | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Manggis | - | - | - | - | 250 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Pepaya | - | - | - | - | 500 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Pisang Kultur | - | - | - | - | 100 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Sayuran | - | - | - | - | 500 Batang | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman | Benih Tanaman Jeruk | 500 Batang | - | - | - | 500 Batang | | 0 | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Manggis | 250 Batang | - | - | - | 250 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Pepaya | 500 Batang | - | - | - | 500 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Pisang (Kultur | 250 Batang | - | - | - | 750 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Pisang Kultur | - | - | - | - | 100 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Sayuran | - | - | - | - | 500 Batang | | | |
| | | Penyediaan Benih Tanaman Sayuran | - | - | - | - | 16000 Batang | | | |
| | | Penyediaan Bibit Gambir | - | - | - | - | 3200 Batang | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|---|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Penyediaan Bibit Kopi Arabika | 6000 Batang | - | - | - | - | | | |
| | | Penyediaan Bibit Kakao Sambung Pucuk | 500 Batang | - | - | - | - | 2000 Batang | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | % penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 68% | | |
| | Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian | Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | 3% | | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Pendampingan Penetapan Perda LP2B | | - | - | - | - | 1 Dokumen | | 14,5 |
| | | Sosialisasi Perda LP2B | | - | - | - | - | 13 Kecamatan | | |
| | | Pengawasan Penerapan Perda LP2B | 13 Kecamatan Sangkar | - | - | - | - | | | |
| | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasandan Komoditas Perkebunan | Masterplan Pengembangan Jagung | 13 Kecamatan Sangkar | - | - | - | - | | | |
| | Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 3% | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi Usaha Tani | 261 meter | - | - | - | - | 2 Unit | | 22,9 |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Pembangunan/Rehab Embung | 6 unit | - | - | - | - | 4 Unit | | 0 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani | 1300 meter | - | - | - | - | 5 Unit | | 11,33 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Pembangunan DAM Parit | 6 unit | - | - | - | - | 4 Unit | | 0 |
| | Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Irigasi Tanah Dalam (Sumur Bor) (DAK) | | - | - | - | - | 1 Unit | | 3,66 |
| | | Jalan Produksi (DAK) | 500 meter | - | - | - | - | 2 Unit | | |
| | | Jalan Produksi (DAU) | 1000 meter | - | - | - | - | 21 Unit | | |
| | | Pembangunan Jaringan Irigasi Desa | 90 meter | - | - | - | - | 1 Unit | | |
| | | Pembangunan Rumah Rajang Rumah Asap | | - | - | - | - | 0 Unit | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Pembangunan Sarana Pembibitan | | - | - | - | - | 2 Lokasi | | |
| | | Pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman hortikultura | 5 ha | - | - | - | - | | | |
| | | Pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman pangan | 5 ha | - | - | - | - | | | |
| | | Irigasi Tanah Dalam (DAK) | 4 unit | - | - | - | - | | | |
| | | Rehab gudang peralatan alsintan | 60 meter bujur sangkar | - | - | - | - | | | |
| | | Rehab jalan produksi | 200 meter | - | - | - | - | | | |
| | | Rehab jides | 90 meter | - | - | - | - | | | |
| | | Rumah bibit | 2 unit | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | 950 Meter Bujur Sangkar | | - | - | - | - | | | |
| | | 456 Meter Bujur Sangkar | | - | - | - | - | | | |
| | | 244 Meter | | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | %fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | | | 70% | | |
| | Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | 3% | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kakao | | - | - | - | - | 1 Kelompok Tani | 1 keltan | 34,7 |
| | | Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan | | - | - | - | - | 2 Kelompok Tani | | |
| | | Gerakan pengendalian OPT tanaman hortikultura | 10 lokasi | - | - | - | - | | | |
| | | Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan | 7 lokasi | - | - | - | - | | | |
| | | Gerakan pengendalian OPT tanaman perkebunan | 7 lokasi | - | - | - | - | | | |
| | | Jumlah klinik PHT | 6 lokasi | - | - | - | - | | | |
| | | Laporan serangan OPT | 1 dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Penerapan dampak perubahan iklim | 26 lokasi | - | - | - | - | | | |
| | | Penyusunan pola tanam | 26 lokasi | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Cadangan benih padi untuk bencana alam | 2000 kg | - | - | - | - | 600 Kg | | 0 |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Cadangan benih tanaman sayuran semusim untuk bencana alam | 5000 gram | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | | | | | | |
| | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Penyusunan Standar Pelayanan publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | SOP Pemberian izin usaha tanaman hortikultura | 1 dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | SOP Pemberian izin usaha tanaman pangan | 1 dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | SOP Pemberian izin usaha tanaman perkebunan | 1 dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha tani | 2 perusahaan | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | - | - | | | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Pembinaan dan pengawasan penerapan penangkar usaha pertanian | 31 penangkar | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PEYULUHAN PERTANIAN | % peningkatan kelas kelompok tani | | | | | | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Forum Temu Tani | 2 Kali | - | - | - | - | 2 Kali | | 17,15 |
| | | Kunjungan Lintas Desa | | - | - | - | - | 2 Kali | | |
| | | Pembinaan dan Penumbuhan Penangkar Hortikultura | | - | - | - | - | 13 Kecamatan | | |
| | | Pembinaan Gapoktan / LKMA Grade A | | - | - | - | - | 25 Kelompok | | |
| | | Pembinaan Gapoktan / LKMA Grade B | | - | - | - | - | 25 Kelompok | | |
| | | Pembinaan Gapoktan / LKMA Grade C | | - | - | - | - | 47 Kelompok | | |
| | | Pembinaan Penerima Dana Bergulir | | - | - | - | - | 12 Bulan | | |
| | | Pengembangan Bawang Merah | | - | - | - | - | 1 Keltan | | |
| | | Pengembangan Cabe | | - | - | - | - | 6 Keltan | | |
| | | Pengembangan Kawasan Cabai | | - | - | - | - | 1 Ha | | |
| | | Pengembangan Kawasan Jeruk | | - | - | - | - | 5 Ha | | |
| | | Pengembangan Kawasan Manggis | | - | - | - | - | 2 Ha | | |
| | | Pengembangan Manggis | | - | - | - | - | 4 Keltan | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|---|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Alat tanam padi manual | 22 Unit | - | - | - | - | | | |
| | | Kunjungan lintas desa | 2 Kali | - | - | - | - | | | |
| | | Pelatihan penyuluh swadaya IPDMIP | 210 Orang | - | - | - | - | | | |
| | | Penas | 1 Kali | - | - | - | - | | | |
| | | Penilaian insan pertanian dan pelaksana IPDMIP | 9 Kategori | - | - | - | - | | | |
| | | Plot BPP | 13 Lokasi | - | - | - | - | | | |
| | | Programa Kabupaten | 1 Dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | Programa Kecamatan | 13 Dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | Review Penyuluh (IPDMIP) | 10 Kali | - | - | - | - | | | |
| | | SOP budidaya tanaman pangan, horti, dan perkebunan | 3 Dokumen | - | - | - | - | | | |
| | | Sosialisasi Gapoktan/LKMA | 2 Kali | - | - | - | - | | | |
| | | Sosialisasi POSLUHNAG | 1 Kali | - | - | - | - | | | |
| | | Temu Teknis | | - | - | - | - | | | |
| | | Temu teknis | 6 Kali | - | - | - | - | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Bimtek Pembuatan Pestisida Nabati | | | | | | 0 Kelompok Tani | | 39,86 |
| | | Bimtek Penangkar Benih Tanaman Pangan | | - | - | - | - | 20 Orang | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Bimtek Pengolahan Tanaman Pangan | | - | - | - | - | 140 Orang | | |
| | | Bimtek Penguatan Kelembagaan | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | Demonstrasi Alsintan | | - | - | - | - | 2 kali | | |
| | | Demplot BPP | | - | - | - | - | 13 Kecamatan | | |
| | | Lomba Pengolahan Kopi | | - | - | - | - | 1 Kali | | |
| | | Pameran Nasional | | - | - | - | - | 1 Event | | |
| | | Pameran Tingkat Kabupaten | | - | - | - | - | 1 Event | | |
| | | Pasar Tani Kabupaten | | - | - | - | - | 12 Kali | | |
| | | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik | | - | - | - | - | 30 Orang | | |
| | | Pengembangan Kawasan Jeruk | | - | - | - | - | 1 kelompok tani | | |
| | | Pengembangan Kawasan Manggis | | - | - | - | - | 1 kelompok tani | | |
| | | Pengembangan Kawasan Sayuran | | - | - | - | - | 1 kelompok tani | | |
| | | Programa Penyuluh Pertanian | | - | - | - | - | 14 Dokumen | | |
| | | Rehabilitasi Tanaman Kakao | | - | - | - | - | 2 Ha | | |
| | | Sekolah Lapang Tanaman Pangan | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL GAP Bawang Merah | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL GAP Gambir | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL GAP Jeruk | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | SL GAP Kakao | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL GAP Kopi | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL GAP Tembakau | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL Iklim Tanaman Pangan | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL PHT Padi | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | SL PHT Tanaman Hortikultura | | - | - | - | - | 0 Kelompok Tani | | |
| | | Sosialisasi Pengolahan Hasil Pertanian | | - | - | - | - | 30 Orang | | |
| | | Buku Catatan Petani | | - | - | - | - | - | | |
| | | Peralatan Penyang dan Penggembur Tanah | | - | - | - | - | - | | |
| | | Demonstrasi alsintan | 2 Kali | - | - | - | - | | | |
| | | Dukungan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian | 105 orang | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Sekolah Lapang GAP Cabe | | | | | | 1 Lokasi | | 23,14 |
| | | Sekolah Lapang Good Agricultur Product Bawang Merah | | - | - | - | - | 1 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang Good Agricultur Product Gambir | | - | - | - | - | 2 Unit | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Sekolah Lapang Good Agricultur Product Jeruk | | - | - | - | - | 1 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang Good Agricultur Product Kakao | | - | - | - | - | 2 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang Good Agricultur Product Kopi Arabika | | - | - | - | - | 2 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang Iklim | | - | - | - | - | 1 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang <i>Integrated Participatory Development Management</i> (IPDMIP) | | - | - | - | - | 9 Kelompok Tani | | |
| | | Sekolah Lapang Padi Gogo | | - | - | - | - | 1 Lokasi | | |
| | | | | - | - | - | - | 1 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang PHT Padi | | - | - | - | - | 1 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang PHT Tanaman Sayuran | | - | - | - | - | 4 Unit | | |
| | | Sekolah Lapang Ubi Kayu | | - | - | - | - | 1 Lokasi | | |
| | | Sekolah lapang GAP | 6 Kelompok | - | - | - | - | | | |
| | | Sekolah lapang GHP | 6 Kelompok | - | - | - | - | | | |
| | | Sekolah lapang iklim tanaman padi dan palawija | 1 Kelompok | - | - | - | - | | | |
| | | Sekolah lapang IPDMIP | 11 Kelompok | - | - | - | - | | | |
| | | Sekolah lapang PHT | 6 Kelompok | - | - | - | - | | | |

| No | Urusan/Bidang Urusan Pmerintah Daerah dan Progra/ Kegiatan | Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan (output) | Target Capaian, Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019/ (n-2) (%) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (Tahun Lalu/ n-1) | | | Target Program dan Kegiatan Renja OPD Tahun Berjalan/ Tahun 2021/ (n) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2021 (Tahun berjalan/n) | |
|----|--|---|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Realisasi Renja OPD Tahun 2020/(n-1) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021 / Tahun Berjalan (n) | Tingkat Realisasi (%) |
| | | Optimalisasi Penyuluh Pertanian | | - | - | - | - | - | | |
| | | Penyediaan Laptop | | - | - | - | - | - | | |
| | | Penyediaan Printer | | - | - | - | - | - | | |
| | | Penyediaan Scanner | | - | - | - | - | - | | |



II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66); Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jabatan Struktural di bawah Kepala Dinas terdiri atas satu orang Sekretaris dan empat (4) orang Kepala Bidang, yaitu a). Bidang Tanaman Pangan, b). Bidang Sarana, Prasarana, Perizinan dan Penyuluhan, c). Bidang Tanaman Perkebunan, d). Bidang Tanaman Hortikultura. Masing-masing Bidang terbagi lagi atas tiga seksi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

Tabel TC.30
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD

Nama OPD : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | Indikator | Target | | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 2,2% | 2,2% | 6,80% | 5,70% | 4,80% | 4,30% | 8,22% | -12,15% | 2,2% | 6,80% | |
| | | Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| | | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Distanhortbun | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 68,13 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 78,86% | 68,13% | 70,00% | 72% | |
| | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Negara | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | |



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

Tabel. Penghitungan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

| Komoditi | 2019 | 2020 | Peningkatan tahun 2020 |
|------------|----------|---------|------------------------|
| Padi | 237,028 | 134,375 | -43 |
| Jagung | 41,353.9 | 39,290 | -5 |
| Jeruk | 39,593 | 58,193 | 47 |
| Cabe Besar | 17,058 | 19,819 | 16 |
| Gambir | 6,802 | 7,827 | 15 |
| Kopi | 1,653 | 422.29 | -74 |
| Rata-Rata | | | -7.42 |

Untuk komoditi Padi terjadi penurunan produksi 43% di tahun 2020 dari 237,028 di tahun 2019 menjadi 134,375 di tahun 2020. Untuk komoditi Jagung terjadi penurunan produksi 5% di tahun 2020 dari 41,353.9 di tahun 2019 menjadi 39,290 di tahun 2020. Untuk komoditi Jeruk terjadi peningkatan produksi 47% di tahun 2020 dari 39,593 di tahun 2019 menjadi 58,193 di tahun 2020. Untuk komoditi Cabe besar terjadi peningkatan produksi 16% di tahun 2020 dari 17,058 di tahun 2019 menjadi 19,819 di tahun 2020. Untuk komoditi Gambir terjadi peningkatan produksi 15% di tahun 2020 dari 6,802 di tahun 2019 menjadi 7,827 di tahun 2020. Untuk komoditi Kopi terjadi penurunan produksi 74% di tahun 2020 dari 1,653 di tahun 2019 menjadi 422.29 di tahun 2020. Rata-rata penurunan produksi untuk komoditi di atas di tahun 2020 sebesar -7.42%.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH / DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan visi: **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu **Madani** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparansi, toleransi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, beradat, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknolog. **Beradat dan Berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada,



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari dalam pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 5 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Pengembangan masyarakat madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan pembangunan insfrastruktur daerah

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam Mendukung pelaksanaan misi II, yaitu “Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional” melalui agenda prioritas



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota turut berperan dalam mensukseskan pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

Dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain kebijakan anggaran yang membatasi luasan kegiatan, Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugasnya, jumlah aparatur (ASN) yang mengalami stagnansi kaderisasi karena tidak adanya penerimaan pegawai baru, sementara aparatur yang memasuki masa purna bakti kian bertambah, dan permasalahan lainnya yang harus disikapi dengan bijak demi tercapainya Visi Daerah

Dalam Pencapaian sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan meletakkan peningkatan produksi bagi 5 komoditi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas, yaitu padi, jagung, cabe, jeruk, dan gambir. Peningkatan produksi bagi 9 komoditi ini akan dicapai melalui rangkaian program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis dinas, disamping itu melalui zonasi komoditi diharapkan dapat dikembangkan komoditi sesuai dengan kebutuhan/kecocokan lingkungan bagi tanaman untuk berproduksi secara maksimal.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan juga berperan dalam peningkatan daya saing Produk unggulan daerah ini. 3 dari 7 Produk Unggulan Daerah berada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, yaitu Gambir, Jeruk dan Manggis. Dalam meningkatkan daya saing 3 produk unggulan daerah, selain melalui peningkatan produksi, juga dilakukan melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil. Peningkatan Jumlah Kelompok/Unit Pengolah Hasil Pertanian merupakan salah satu Indikator Kinerja utama Dinas, karena itu diharapkan melalui



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

pembinaan dan rangkaian kegiatan dan bantuan dinas kepada kelompok/unit pengolah hasil ini turut meningkatkan daya saing komoditi Gambir, Jeruk dan Manggis di pasaran.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam Penyusunan Renja ini, terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD. Penyempurnaan terus dilakukan seiring dengan masukan, informasi dan rekomendasi dari hasil pembahasan TAPD, dewan dan Petunjuk dari Pusat mengenai pengelolaan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, dan sebagainya.

Selain Hal diatas, Peralihan dari Permendagri 13 tahun 2006 ke permendagri 90 tahun 2019 mengakibatkan banyak penyesuaian dan pemetaan kembali Program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Dari 10 Program berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 setelah dipetakan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2009 menjadi 6 Program saja.

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Pertanian

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|---|---------------|--|------------------------|------------------------|---|---------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 19,658,661,500 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | 19,658,661,500. | |
| | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Distanhortbun | | | 276,310,800. | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Distanhortbun | | | 276,310,800. | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Distanhortbun | Perubahan Rencana Kerja Dinas Rencana Kerja Dinas | 1 dokumen 1 dokumen | 14,465,000. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Distanhortbun | Perubahan Rencana Kerja Dinas Rencana Kerja Dinas | 1 dokumen 1 dokumen | 14,465,000. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Distanhortbun | RKA Dinas | 1 dokumen | 12,073,900. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Distanhortbun | RKA Dinas | 1 dokumen | 12,073,900. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Distanhortbun | Perubahan RKA Dinas | 1 dokumen | 12,629,200. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Distanhortbun | Perubahan RKA Dinas | 1 dokumen | 12,629,200. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Distanhortbun | DPA Dinas | 1 dokumen | 8,077,500. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Distanhortbun | DPA Dinas | 1 dokumen | 8,077,500. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Distanhortbun | Perubahan DPA Dinas | 1 dokumen | 8,243,500. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Distanhortbun | Perubahan DPA Dinas | 1 dokumen | 8,243,500. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Distanhortbun | LKjIP LKPJ | 1 dokumen 1 dokumen | 53,918,200. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Distanhortbun | LKjIP LKPJ | 1 dokumen 1 dokumen | 53,918,200. | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Distanhortbun | Data Base Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 1 dokumen | 166,903,500. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Distanhortbun | Data Base Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 1 dokumen | 166,903,500. | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Distanhortbun | | | 16,774,960,800. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Distanhortbun | | | 16,774,960,800. | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Distanhortbun | Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya | 156 Orang | 16,743,720,800. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Distanhortbun | Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya | 156 Orang | 16,743,720,800. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Distanhortbun | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen | 11,678,400. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Distanhortbun | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen | 11,678,400. | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|---|---------------|--|----------------|---------------------|---|---------------|--|----------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Tanggapan Pemeriksaan | 1 dokumen | 4,578,600. | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Tanggapan Pemeriksaan | 1 dokumen | 4,578,600. | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Distanhortbun | Laporan Keuangan Bulanan | 12 dokumen | 10,683,000. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Distanhortbun | Laporan Keuangan Bulanan | 12 dokumen | 10,683,000. | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Distanhortbun | Laporan Prognosis | 2 dokumen | 4,300,000. | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Distanhortbun | Laporan Prognosis | 2 dokumen | 4,300,000. | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 6,600,000. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 6,600,000. | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Distanhortbun | Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah | 2 dokumen | 1,170,200. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Distanhortbun | Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah | 2 dokumen | 1,170,200. | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Distanhortbun | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya | 156 orang | 5,429,800. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Distanhortbun | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjanganannya | 156 orang | 5,429,800. | |
| | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | 3,300,000. | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | 3,300,000. | |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Distanhortbun | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 dokumen | 3,300,000. | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Distanhortbun | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 dokumen | 3,300,000. | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 147,670,000. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 147,670,000. | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Distanhortbun | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 250 stell | 125,000,000. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Distanhortbun | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 250 stell | 125,000,000. | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Distanhortbun | Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya | 157 orang | 14,120,000. | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Distanhortbun | Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya | 157 orang | 14,120,000. | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Distanhortbun | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat | 3 orang | 8,550,000. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Distanhortbun | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat | 3 orang | 8,550,000. | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|---|---------------|--|----------------|---------------------|---|---------------|--|----------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 618,269,900. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 618,269,900. | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Distanhortbun | Fasilitas Penerangan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19 Gedung | 20,130,000. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Distanhortbun | Fasilitas Penerangan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19 Gedung | 20,130,000. | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Distanhortbun | Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor/Kebutuhan Kantor | 1 Tahun | 25,228,200. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Distanhortbun | Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor/Kebutuhan Kantor | 1 Tahun | 25,228,200. | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Distanhortbun | Fasilitasi ATK Dinas, PPT, dan BPP (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 102,446,700. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Distanhortbun | Fasilitasi ATK Dinas, PPT, dan BPP (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 102,446,700. | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Distanhortbun | Fasilitasi Barang Cetak dan Pengadaan (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 86,204,000. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Distanhortbun | Fasilitasi Barang Cetak dan Pengadaan (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 86,204,000. | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Distanhortbun | Jumlah Tamu yang di layani | 1092 Orang | 21,000,000. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Distanhortbun | Jumlah Tamu yang di layani | 1092 Orang | 21,000,000. | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Distanhortbun | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 1 dokumen | 363,261,000. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Distanhortbun | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 1 dokumen | 363,261,000. | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 290,000,000. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 290,000,000. | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Distanhortbun | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 Unit | 100,000,000. | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Distanhortbun | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 Unit | 100,000,000. | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Distanhortbun | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer) | 10 Unit | 190,000,000. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Distanhortbun | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer) | 10 Unit | 190,000,000. | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Printer) | 10 Unit | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Printer) | 10 Unit | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|--|---------------------------|---|----------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 780,610,000. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 780,610,000. | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Distanhortbun | Fasilitasi Jasa Surat Menyurat | 1500 Lembar | 15,000,000. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Distanhortbun | Fasilitasi Jasa Surat Menyurat | 1500 Lembar | 15,000,000. | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Distanhortbun | Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 165,710,000. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Distanhortbun | Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 165,710,000. | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Distanhortbun | Jumlah Tenaga PelayananUmum Kantor yang Tersedia | 39 Orang | 599,900,000. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Distanhortbun | Jumlah Tenaga PelayananUmum Kantor yang Tersedia | 39 Orang | 599,900,000. | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 760,940,000. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 760,940,000. | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Distanhortbun | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 163 Unit | 458,350,000. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Distanhortbun | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 163 Unit | 458,350,000. | |
| | Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya | Distanhortbun | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 39 Unit | 52,340,000. | Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya | Distanhortbun | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 39 Unit | 52,340,000. | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Distanhortbun | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 250,250,000. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Distanhortbun | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (19 gedung kantor) | 1 Tahun | 250,250,000. | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 6,002,335,000. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 6,002,335,000. | |
| | Pengawasan, Penggunaan Sarana Pertanian | | | | 4,082,445,000. | Pengawasan, Penggunaan Sarana Pertanian | | | | 4,082,445,000. | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | kabupaten Lima Puluh Kota | Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian | 30 Orang | 158,000,000. | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | kabupaten Lima Puluh Kota | Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian | 30 Orang | 158,000,000. | |
| | | | Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) | 50 Orang | | | | Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) | 50 Orang | | |
| | | | Pengadaan APPO | 3 Unit | | | | Pengadaan APPO | 3 Unit | | |
| | | | Pengadaan Corn Shellers | 5 Unit | | | | Pengadaan Corn Shellers | 5 Unit | | |
| | | | Pengadaan Cultivator | 10 Unit | | | | Pengadaan Cultivator | 10 Unit | | |
| | | | Pengadaan Gerobak | 6 Unit | | | | Pengadaan Gerobak | 6 Unit | | |
| | | | Pengadaan Gudang Perkakas Alsintan | 1 unit | | | | Pengadaan Gudang Perkakas Alsintan | 1 unit | | |
| | | | Pengadaan Mesin Jahit Karung | 3 Unit | | | | Pengadaan Mesin Jahit Karung | 3 Unit | | |
| | | | Pengadaan Power Thresher | 5 Unit | | | | Pengadaan Power Thresher | 5 Unit | | |
| | | | Pengadaan Sarana Pendukung Pengolahan Pupuk Organik | 1 Unit | | | | Pengadaan Sarana Pendukung Pengolahan Pupuk Organik | 1 Unit | | |
| | | | Pengadaan Timbangan Duduk | 3 unit | | | | Pengadaan Timbangan Duduk | 3 unit | | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 | 14 Unit | | | | Pengadaan Traktor Roda 2 | 14 Unit | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|--|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 22,307,054,200. | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 22,307,054,200. | |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 638,989,200. | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | 638,989,200. | |
| | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pengawasan Penerapan Perda LP2B | 13 Kecamatan Sangkar | 186,469,400. | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pengawasan Penerapan Perda LP2B | 13 Kecamatan Sangkar | 186,469,400. | |
| | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasandan Komoditas Perkebunan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Masterplan Pengembangan Jagung | 13 Kecamatan Sangkar | 452,519,800. | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasandan Komoditas Perkebunan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Masterplan Pengembangan Jagung | 13 Kecamatan Sangkar | 452,519,800. | |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | 21,668,065,000. | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | 21,668,065,000. | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kabupaten Lima Puluh Kota | Buku Saku Irigasi | 25 Buku | 4,519,592,500. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kabupaten Lima Puluh Kota | Buku Saku Irigasi | 25 Buku | 4,519,592,500. | |
| | | | Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 216 Meter | | | | Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 216 Meter | | |
| | | | Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 45 Meter | | | | Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 45 Meter | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Embung | 3 Unit | 866,750,000. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Embung | 3 Unit | 866,750,000. | |
| | | | Rehab Rehab | 3 Unit | | | | Rehab Rehab | 3 Unit | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Kabupaten Lima Puluh Kota | Buku Saku Irigasi | 25 Buku | 11,334,416,300. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Kabupaten Lima Puluh Kota | Buku Saku Irigasi | 25 Buku | 11,334,416,300. | |
| | | | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 1100 Meter | | | | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 1100 Meter | | |
| | | | Rehab Jalan Usaha Tani | 200 Meter | | | | Rehab Jalan Usaha Tani | 200 Meter | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Kabupaten Lima Puluh Kota | Dam Parit | 3 unit | 714,950,000. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Kabupaten Lima Puluh Kota | Dam Parit | 3 unit | 714,950,000. | |
| | | | Rehab Dam Parit | 3 Unit | | | | Rehab Dam Parit | 3 Unit | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pemeliharaan Gedung BPP | 950 Meter Bujur Sangkar | 2,675,129,300. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pemeliharaan Gedung BPP | 950 Meter Bujur Sangkar | 2,675,129,300. | |
| | | | Rehab BPP | 456 Meter Bujur Sangkar | | | | Rehab BPP | 456 Meter Bujur Sangkar | | |
| | | | Rehab Pagar BPP | 244 Meter | | | | Rehab Pagar BPP | 244 Meter | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kabupaten Lima Puluh Kota | Irigasi Tanah Dalam (DAK) | 4 unit | 1,557,226,900. | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Kabupaten Lima Puluh Kota | Irigasi Tanah Dalam (DAK) | 4 unit | 1,557,226,900. | |
| | | | Jalan Produksi (DAK) | 500 meter | | | | Jalan Produksi (DAK) | 500 meter | | |
| | | | Jalan Produksi (DAU) | 1000 meter | | | | Jalan Produksi (DAU) | 1000 meter | | |
| | | | Pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman hortikultura | 5 ha | | | | Pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman hortikultura | 5 ha | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|---|---------------------------|---|------------------------|---------------------|---|---------------------------|---|------------------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman pangan | 5 ha | | | | Pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman pangan | 5 ha | | |
| | | | Pembangunan Jides | 90 meter | | | | Pembangunan Jides | 90 meter | | |
| | | | Rehab gudang peralatan alsintan | 60 meter bujur sangkar | | | | Rehab gudang peralatan alsintan | 60 meter bujur sangkar | | |
| | | | Rehab jalan produksi | 200 meter | | | | Rehab jalan produksi | 200 meter | | |
| | | | Rehab jides | 90 meter | | | | Rehab jides | 90 meter | | |
| | | | Rumah bibit | 2 unit | | | | Rumah bibit | 2 unit | | |
| | | | | | 1,468,772,600. | | | | | 1,468,772,600. | |
| | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | | | | 1,468,772,600. | |
| | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | | | | 1,468,772,600. | |
| | Pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Gerakan pengendalian OPT tanaman hortikultura | 10 lokasi | 920,347,600. | Pengendalian Organisme Pengganggu (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Gerakan pengendalian OPT tanaman hortikultura | 10 lokasi | 920,347,600. | |
| | | | Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan | 7 lokasi | | | | Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan | 7 lokasi | | |
| | | | Gerakan pengendalian OPT tanaman perkebunan | 7 lokasi | | | | Gerakan pengendalian OPT tanaman perkebunan | 7 lokasi | | |
| | | | Jumlah klinik PHT | 6 lokasi | | | | Jumlah klinik PHT | 6 lokasi | | |
| | | | Laporan serangan OPT | 1 dokumen | | | | Laporan serangan OPT | 1 dokumen | | |
| | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Penerapan dampak perubahan iklim | 26 lokasi | 357,205,000. | Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Penerapan dampak perubahan iklim | 26 lokasi | 357,205,000. | |
| | | | Penyusunan pola tanam | 26 lokasi | | | | Penyusunan pola tanam | 26 lokasi | | |
| | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Cadangan benih padi untuk bencana alam | 2000 kg | 191,220,000. | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Cadangan benih padi untuk bencana alam | 2000 kg | 191,220,000. | |
| | | | Cadangan benih tanaman sayuran semusim untuk bencana alam | 5000 gram | | | | Cadangan benih tanaman sayuran semusim untuk bencana alam | 5000 gram | | |
| | | | | | 283,741,700. | | | | | 283,741,700. | |
| | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | | | | 283,741,700. | |
| | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 283,741,700. | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 283,741,700. | |
| | Penyusunan Standar Pelayanan publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | SOP Pemberian izin usaha tanaman hortikultura | 1 dokumen | 190,291,700. | Penyusunan Standar Pelayanan publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | SOP Pemberian izin usaha tanaman hortikultura | 1 dokumen | 190,291,700. | |
| | | | SOP Pemberian izin usaha tanaman pangan | 1 dokumen | | | | SOP Pemberian izin usaha tanaman pangan | 1 dokumen | | |
| | | | SOP Pemberian izin usaha tanaman perkebunan | 1 dokumen | | | | SOP Pemberian izin usaha tanaman perkebunan | 1 dokumen | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|--|---------------------------|---|----------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha tani | 2 perusahaan | 18,910,000. | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha tani | 2 perusahaan | 18,910,000. | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pembinaan dan pengawasan penerapan penangkar usaha pertanian | 31 penangkar | 74,540,000. | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pembinaan dan pengawasan penerapan penangkar usaha pertanian | 31 penangkar | 74,540,000. | |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 6,516,471,000. | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | 6,516,471,000. | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pelatihan penyuluh swadaya IPDMIP | 210 Orang | 693,175,000. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pelatihan penyuluh swadaya IPDMIP | 210 Orang | 693,175,000. | |
| | | | Plot BPP | 13 Lokasi | | | | Plot BPP | 13 Lokasi | | |
| | | | Programa kabupaten | 1 dokumen | | | | Programa kabupaten | 1 dokumen | | |
| | | | Programa kecamatan | 13 dokumen | | | | Programa kecamatan | 13 dokumen | | |
| | | | Review penyuluh (IPDMIP) | 10 kali | | | | Review penyuluh (IPDMIP) | 10 kali | | |
| | | | SOP budidaya tanaman pangan, horti, dan perkebunan | 3 dokumen | | | | SOP budidaya tanaman pangan, horti, dan perkebunan | 3 dokumen | | |
| | | | Temu teknis | 6 kali | | | | Temu teknis | 6 kali | | |
| | | | Training | 312 training | | | | Training | 312 training | | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kabupaten Lima Puluh Kota | Alat tanam padi manual | 22 Unit | 902,169,500. | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kabupaten Lima Puluh Kota | Alat tanam padi manual | 22 Unit | 902,169,500. | |
| | | | Forum temu tani | 2 Kali | | | | Forum temu tani | 2 Kali | | |
| | | | Kunjungan lintas desa | 2 Kali | | | | Kunjungan lintas desa | 2 Kali | | |
| | | | Pelatihan penyuluh swadaya IPDMIP | 210 Orang | | | | Pelatihan penyuluh swadaya IPDMIP | 210 Orang | | |
| | | | Penas | 1 Kali | | | | Penas | 1 Kali | | |
| | | | Penilaian insan pertanian dan pelaksana IPDMIP | 9 Kategori | | | | Penilaian insan pertanian dan pelaksana IPDMIP | 9 Kategori | | |
| | | | Plot BPP | 13 Lokasi | | | | Plot BPP | 13 Lokasi | | |
| | | | Programa Kabupaten | 1 Dokumen | | | | Programa Kabupaten | 1 Dokumen | | |
| | | | Programa Kecamatan | 13 Dokumen | | | | Programa Kecamatan | 13 Dokumen | | |
| | | | Review Penyuluh (IPDMIP) | 10 Kali | | | | Review Penyuluh (IPDMIP) | 10 Kali | | |
| | | | SOP budidaya tanaman pangan, horti, dan perkebunan | 3 Dokumen | | | | SOP budidaya tanaman pangan, horti, dan perkebunan | 3 Dokumen | | |
| | | | Sosialisasi Gapoktan/LKMA | 2 Kali | | | | Sosialisasi Gapoktan/LKMA | 2 Kali | | |
| | | | Sosialisasi POSLUHNAG | 1 Kali | | | | Sosialisasi POSLUHNAG | 1 Kali | | |
| | | | Temu teknis | 6 Kali | | | | Temu teknis | 6 Kali | | |
| | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Demonstrasi alsintan | 2 Kali | 485,336,500. | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Demonstrasi alsintan | 2 Kali | 485,336,500. | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Ctt Penting |
|----|---|---------------------------|--|----------------|--------------------------|---|---------------------------|--|----------------|--------------------------|-------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Dukungan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian | 105 orang | | | | Dukungan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian | 105 orang | | |
| | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sekolah lapang GAP | 6 Kelompok | 4,435,790,000. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sekolah lapang GAP | 6 Kelompok | 4,435,790,000. | |
| | | | Sekolah lapang GHP | 6 Kelompok | | | | Sekolah lapang GHP | 6 Kelompok | | |
| | | | Sekolah lapang iklim tanaman padi dan palawija | 1 Kelompok | | | | Sekolah lapang iklim tanaman padi dan palawija | 1 Kelompok | | |
| | | | Sekolah lapang IPDMIP | 11 Kelompok | | | | Sekolah lapang IPDMIP | 11 Kelompok | | |
| | | | Sekolah lapang PHT | 6 Kelompok | | | | Sekolah lapang PHT | 6 Kelompok | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 56,237,036,000.00 | | | | | | |



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

Masyarakat mengajukan usulan melalui musrenbang yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Nagari, Kecamatan hingga kabupaten. Hasil musrenbang kabupaten selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan skala prioritas dan aturan yang berlaku melalui aplikasi e planning. Secara umum usulan dari Nagari banyak yang gugur karena usulan tidak jelas, baik bentuk bantuan yang diminta, jumlah bantuan maupun usulan pelaksana/ penerimaan bantuan.

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Dinas Pertanian

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Ctt Penting |
|----|---|---------------|--|----------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| 1 | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Distanhortbun | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Distanhortbun | Perubahan Rencana Kerja Dinas | 1 dokumen | |
| | | | Rencana Kerja Dinas | 1 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Distanhortbun | RKA Dinas | 1 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Distanhortbun | Perubahan RKA Dinas | 1 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Distanhortbun | DPA Dinas | 1 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Distanhortbun | Perubahan DPA Dinas | 1 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Distanhortbun | LKJIP | 1 dokumen | |
| | | | LKPJ | 1 dokumen | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Distanhortbun | Data Base Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan | 1 dokumen | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Distanhortbun | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Distanhortbun | Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 156 Orang | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Distanhortbun | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 dokumen | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Tanggapan Pemeriksaan | 1 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Distanhortbun | Laporan Keuangan Bulanan | 12 dokumen | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Distanhortbun | Laporan Prognosis | 2 dokumen | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Distanhortbun | Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah | 2 dokumen | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Distanhortbun | Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya | 156 orang | |
| | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Distanhortbun | Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 dokumen | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Distanhortbun | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 250 stell | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Distanhortbun | Jumlah Aparatur yang dinilai Kinerjanya | 157 orang | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Distanhortbun | Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat | 3 orang | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Ctt Penting |
|----|--|---------------------------|---|----------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Distanhortbun | Fasilitas Penerangan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19 Gedung | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Distanhortbun | Sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor/Kebutuhan Kantor | 1 Tahun | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Distanhortbun | Fasilitas ATK Dinas, PPT, dan BPP (19 gedung kantor) | 1 Tahun | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Distanhortbun | Fasilitas Barang Cetak dan Penggandaan (19 gedung kantor) | 1 Tahun | |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Distanhortbun | Jumlah Tamu yang di layani | 1092 Orang | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Distanhortbun | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 1 dokumen | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Distanhortbun | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 | 1 Unit | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Distanhortbun | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Komputer) | 10 Unit | |
| | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (Printer) | 10 Unit | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Distanhortbun | Fasilitas Jasa Surat Menyurat | 1500 Lembar | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Distanhortbun | Fasilitas Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik (19 gedung kantor) | 1 Tahun | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Distanhortbun | Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia | 39 Orang | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Distanhortbun | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara | 163 Unit | |
| | Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya | Distanhortbun | Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 39 Unit | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Distanhortbun | Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor (19 gedung kantor) | 1 Tahun | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | |
| | Pengawasan, Penggunaan Sarana Pertanian | | | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | kabupaten Lima Puluh Kota | Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian | 30 Orang | |
| | | | Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) | 50 Orang | |
| | | | Pengadaan APPO | 3 Unit | |
| | | | Pengadaan Corn Shellers | 5 Unit | |
| | | | Pengadaan Cultivator | 10 Unit | |
| | | | Pengadaan Gerobak | 6 Unit | |
| | | | Pengadaan Gudang Perkakas Alsintan | 1 unit | |
| | | | Pengadaan Mesin Jahit Karung | 3 Unit | |
| | | | Pengadaan Power Thresher | 5 Unit | |
| | | | Pengadaan Sarana Pendukung Pengolahan Pupuk Organik | 1 Unit | |
| | | | Pengadaan Timbangan Duduk | 3 unit | |
| | | | Pengadaan Traktor Roda 2 | 14 Unit | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Ctt Penting |
|----|--|---------------------------|---|----------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Rapat Koordinasi Pupuk Organik | 50 Orang | |
| | | | Rapat Monitoring dan Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi | 60 Orang | |
| | | | Sosialisasi Penyaluran Pupuk | 2 Kali | |
| | | | | | |
| | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | kabupaten Lima Puluh Kota | Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk | 60 Orang | |
| | | | Rapat Monitoring dan Pembinaan Penyaluran Pupuk | 90 orang | |
| | | | Sosialisasi Penyaluran Pupuk Subsidi | 90 orang | |
| | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| | | | | | |
| | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Kabupaten Lima Puluh Kota | Benih Gambir Varietas Lokal dari Kebun Induk | 3.75 gram | |
| | | | | | |
| | | | Benih Sumber Varietas Junjuang dalam Klas Benih BR | 10000 kg | |
| | | | Benih Sumber Varietas Junjuang dalam Klas Benih NS, BS, BD & BP | 1200 Kg | |
| | | | Pelepasan Varietas Lokal Ubi Kayu | 1 Varietas | |
| | | | Pemurnian Varietas Lokal Padi Sawah | 1 Varietas | |
| | | | Saprodi untuk Pengembangan Jagung Hibrida | 10 Ha | |
| | | | | | |
| | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Kabupaten Lima Puluh Kota | Penyediaan Benih Tanaman Manggis | 250 Batang | |
| | | | Penyediaan Benih Tanaman Pepaya | 500 Batang | |
| | | | Penyediaan Benih Tanaman Pisang Kultur Jaringan | 250 Batang | |
| | | | Penyediaan Bibit Kakao Sambung Pucuk | 500 Batang | |
| | | | Penyediaan Bibit Kopi Arabika | 6000 Batang | |
| | | | Penyediaan Bibit Tanaman Jeruk | 500 Batang | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | |
| | | | | | |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | | | | |
| | | | | | |
| | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pengawasan Penerapan Perda LP2B | 13 Kecamatan Sangkar | |
| | | | | | |
| | Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasandan Komoditas Perkebunan | Kabupaten Lima Puluh Kota | Masterplan Pengembangan Jagung | 13 Kecamatan Sangkar | |
| | | | | | |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | |
| | | | | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Kabupaten Lima Puluh Kota | Buku Saku Irigasi | 25 Buku | |
| | | | Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 216 Meter | |
| | | | Rehab Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani | 45 Meter | |
| | | | | | |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Embung | 3 Unit | |
| | | | Rehab Rehab | 3 Unit | |
| | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Ctt Penting |
|----|---|---------------------------|--|----------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Kabupaten Lima Puluh Kota | Pelatihan penyuluh swadaya IPDMIP | 210 Orang | |
| | | | Plot BPP | 13 Lokasi | |
| | | | Programa kabupaten | 1 dokumen | |
| | | | Programa kecamatan | 13 dokumen | |
| | | | Review penyuluh (IPDMIP) | 10 kali | |
| | | | SOP budidaya tanaman pangan, horti, dan perkebunan | 3 dokumen | |
| | | | Temu teknis | 6 kali | |
| | | | Training | 312 training | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Kabupaten Lima Puluh Kota | Alat tanam padi manual | 22 Unit | |
| | | | Forum temu tani | 2 Kali | |
| | | | Kunjungan lintas desa | 2 Kali | |
| | | | Pelatihan penyuluh swadaya IPDMIP | 210 Orang | |
| | | | Penas | 1 Kali | |
| | | | Penilaian insan pertanian dan pelaksana IPDMIP | 9 Kategori | |
| | | | Plot BPP | 13 Lokasi | |
| | | | Programa Kabupaten | 1 Dokumen | |
| | | | Programa Kecamatan | 13 Dokumen | |
| | | | Review Penyuluh (IPDMIP) | 10 Kali | |
| | | | SOP budidaya tanaman pangan, horti, dan perkebunan | 3 Dokumen | |
| | | | Sosialisasi Gapoktan/LKMA | 2 Kali | |
| | | | Sosialisasi POSLUHNAG | 1 Kali | |
| | | | Temu Teknis | | |
| | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Kabupaten Lima Puluh Kota | Demonstrasi alsintan | 2 Kali | |
| | | | Dukungan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian | 105 orang | |
| | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sekolah lapang GAP | 6 Kelompok | |
| | | | Sekolah lapang GHP | 6 Kelompok | |
| | | | Sekolah lapang iklim tanaman padi dan palawija | 1 Kelompok | |
| | | | Sekolah lapang IPDMIP | 11 Kelompok | |
| | | | Sekolah lapang PHT | 6 Kelompok | |



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan pertanian di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan Budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana
6. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup/Infrastruktur
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
11. Pendidikan
12. Kesehatan
13. Ketahanan pangan
14. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
15. Prioritas lainnya :
 - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - b. Bidang Perekonomian



c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pertanian yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia, mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan pertanian diarahkan agar dapat memprioritaskan :

- 1. Peningkatan Produksi** pertanian, melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian.
- 2. Peningkatan Produktivitas**, sehingga dengan luasan lahan yang sama, petani bisa memperoleh nilai tambah dari hasil usaha tani yang dilakukannya.
- 3. Peningkatan Mutu**, adalah usaha untuk menambah kualitas dan daya saing hasil pertanian.
- 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani**, adalah tingkatan kondisi di mana petani sudah berada dalam keadaan bebas dari ketergantungan dan mampu mengembangkan usaha taninya



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam rangka mensukseskan Misi Daerah “Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah” maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota menerjemahkan misi tersebut kedalam tujuan dinas yaitu Revitalisasi Pertanian Menuju Agroindustri.

Untuk mencapai misi diatas, maka dirumuskan beberapa sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Rencana Kerja

| No | Tujuan/ | Sasaran | Indikator Sasaran | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|--|--|--|------|------|------|------|------|
| 1 | Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB dalam harga berlaku | Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan | Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |



III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Usulan Program dan Kegiatan disusun berdasarkan target IKU yang ingin dicapai dengan berpedoman pada renstra yang telah ada. Berdasarkan IKU Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai peningkatan produksi untuk Komoditi padi, jagung, jeruk, cabe, dan gambir.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai “*pendukung*” bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima puluh Kota.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 terdiri dari :



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana pertanian berupa alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida, dan sumber daya genetik (benih).

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan prasarana pertanian berupa jaringan irigasi, jalan pertanian dan infrastruktur pertanian.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha bertani

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk peningkatan kelas kelompok tani



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

| No | Sasaran | Indikator | Target | | Ket |
|----|---|--|--------|-------|-----|
| | | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | 27.64 | 28.47 | |

Tabel 4.2 Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2020

| No | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Satuan | Target | | Ket |
|----|---|--------|--------|------|-----|
| | | | 2021 | 2022 | |
| 1 | Pertanian | | | | |
| | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar | Ton/Ha | 4.58 | 4.78 | |

Tabel 4.3 Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2022

| No | Bidang Urusan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | Ket |
|-----|-------------------------------|------------|------------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|-----|
| | | Program | | | Kegiatan | | | |
| | | Jumlah | Total Pagu (Rp.) | Pagu Indikatif (Rp.) | Jumlah | Total Pagu Indikatif (Rp.) | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 1 | Program dan kegiatan pada OPD | 6 | 42,475,750.001 | 45,312,747.743 | 16 | 42,475,750.001 | 45,312,747.743 | |
| 2 | Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 2.1 | Urusan Pertanian | 6 | 42,475,750.001 | 45,312,747.743 | 16 | 42,475,750.001 | 45,312,747.743 | |



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Program Tahunan** Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.